

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang kebutuhan pokok dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.
- Jadi perkembangan inflasi daerah dan perkembangan harga kebutuhan pokok di Wilayah Daerah Kabupaten Gowa, tetap terkendali hal ini tercermin pada ekspektasi inflasi dan tekanan inflasi yang terus menurun dan lebih rendah dari perkiraan awal (secara nasional). Perkembangan inflasi IHK yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergitas kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Serta Pemerintah Daerah Kab. Gowa, Bank Indonesia, serta mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi seperti sinergitas TIM TPID Daerah Kab. Gowa beserta Forkopinda Kab. Gowa.
- Sementara resiko kedepannya bisa diantisipasi dengan dibentuknya Tim TPID Daerah Kabupaten Gowa serta Kerjasama Kolaborasi Tim dan Forkopinda Daerah Kab. Gowa, hal ini diperkuat dengan adanya SK Bapak Bupati Nomor: 126/I/2025 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Gowa. Sementara itu juga Tim Inflasi Daerah Kabupaten Gowa menyusun strategi Peta Jalan dan Rencana Aksi penyelenggaraan antisipasi resiko inflasi kedepannya seperti mengadakan Pasar Murah dan Kerja sama dengan Kab/Kot Daerah yang ada di Sulawesi Selatan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Pada Maret 2025 terjadi Inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,67 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,78. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Pare-pare sebesar 1,98 persen dengan IHK sebesar 108,11 dan terendah terjadi di Kota Makassar sebesar 0,46 persen dengan IHK sebesar 107 Berdasarkan Data Pusat Statistik sebagai hasil Kerjasama Kolaborasi dan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi melalui Tim TPIP, TPID dan GNPIP serta Tim Forkopinda Daerah Kab. Gowa dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi yang efektif yang terus terjalin dan terjaga baik antara semua tim.
- Kabupaten Gowa Alhamdulillah tidak terjadi inflasi mengingat Pemerintah Daerah Bersama Tim TPID dan Forkopinda saling bahu membahu dan berkolaborasi mengatasi jangan sampai inflasi, dan dari semua data yang kami dapatkan khususnya wilayah Kabupaten Gowa yang bisa memicu kenaikan harga dan menyebabkan inflasi adalah bawang merah dan cabe rawit, tomat, dan Alhamdulillah melalui petunjuk pimpinan dalam hal ini Ibu Bupati Gowa mengelontorkan Dana Hibah BTT yang peruntukannya untuk menekan laju inflasi di Kab. Gowa. Selanjutnya Pemerintah Daerah melakukan Operasi Pasar secara bergilir disetiap kecamatan membagikan Bawang Merah dan Cabe Rawit dan Tomat terhadap Masyarakat umum khususnya bagi pelaku UMKM yang memiliki usaha gorengan yang lebih banyak/dominan memakai bawang merah dan cabe tersebut diatas.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

- Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa secara konsisten memberlakukan pengamanan dan pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusian bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
- Pemerintah daerah terus meningkatkan penggarapan produksi dan pasokan khususnya cabai merah dan bawang merah untuk menekan laju tingginya harga capai dan bawang merah yang bisa berdampak terhadap inflasi daerah.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dalam menekan laju inflasi, menjaga stabilitas harga dan daya beli Masyarakat. Sinergitas dari TPIP dan Tim TPID terus dilakukan berbagai Langkah dan program yang bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi bahan pokok dan penting lainnya.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Perlunya terus dijaga pengendalian inflasi agar tetap rendah dan stabil dengan jalan tetap mengikuti atauaran rambu-rambu peraturan daerah yang sudah ditetapkan melalui Perda maupun dalam bentuk regulasi lainnya seperti aturan dari pemerintah pusat.
- Menurunkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) serta memngawasi penyaluran distribusi pasokan bahan pokok dan penting lainnya serta terus Kerjasama kolaborasi dan koordinasi seraca sinergis yang dilakukan secra lintas sectoral/instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
- Melakukan penguatan Kelembagaan Tim Pengendalian Inflasi (Permenko Nomor PK. TPID/ 76 / M.Ekon / 02/ 2025) Tentang Upaya menjaga Inflasi 2025 serta menjaga stabilitas harga pada bulan ramadhan dan jhari raya idul fitri tahun 2025.
- Membuat Raodmap pengendalian inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- **Keterjangkauan Harga:** mendorong efektifitas pemanfaatan APBD melalui percepatan realisasi dan melakukan intervensi dalam rangka stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
- **Ketersedian Pasokan:** memperhatikan sisi pasokan pangan, distribusi, ketersediaan infrastruktur dan hal-hal yang bersifat structural seperti penurunan biaya operasinal angkutan dsb.
- **Kelancaran Distribusi:** mendorong perdagangan antar dalam daerah, dalam rangka menjaga pasokan komoditas pangan di daerah kabupaten Gowa dan membangun Kolaborasi Kerjasama yang terstruktur dan mensinkrongkan pasar-pasar pengumpul untuk memperluas akses pasar petani dan mengefisienkan rantai distrbusi bahan pokok dan penting lainnya;
- **Komuniaksi Efektif:** memantau dan mengawasi pergerakan harga, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi, untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan respon atas perubahan harga serta mengatasi informasi asimetris dengan mengintensifkan pemantauan lapangan dibandingkan kegiatan yang bersifat administrative.
- Menjaga mekanisme pasar dengan bantuan jajaran kepolisian dan aparat keamanan lainnya, khususnya dalam mengatasi penimbunan bahan pangan.

◦